

NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN FIKIH DI MADRASAH TSANAWIYAH

Mazrur

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya

mazrur_62@yahoo.co.id

ABSTRACT

Making democratic citizens is one of the functions of national education. For that we need to develop democratic value, by applying democratic value in learning activities. Fikih lesson is one of many religious subjects containing different views which has been taught in Madrasah Tsanawiyah (MTs). MTs student have already started thinking abstractly that make clash of views and experiences between students. This requires teachers applying democratic value in learning Fikih lesson.

Research conducted at Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palangka Raya and Madrasah Tsanawiyah Muslimat NU Palangka Raya have multicultural student. This research can be concluded that MTs Palangka Raya Fikih learning applied democratic value in learning activities such freedom, equality, tolerance, openness, trust and competition. Factors affecting democratic values application are students 'readiness, teachers ability to understand students' cognitive development, the creation of a pleasant atmosphere, freedom interaction and using humanistic by developing structural and cultural communication.

Keywords: Nilai demokrasi, Pembelajaran Fikih.

A. Pendahuluan

Kebhinekaan, toleransi dan demokrasi sudah sejak awal kemerdekaan menjadi dasar dan tonggak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun sampai sekarang masih dirasakan lemahnya sikap demokratis dan toleransi. Berbagai kejadian sering dipertunjukkan oleh anak bangsa ini, yang menunjukkan sikap tidak toleran dan undemokratis, seperti menganggap musuh terhadap orang yang berbeda pandangan atau faham, bertindak anarkis terhadap pandangan yang berbeda, penggunaan kekerasan, pemaksaan kehendak, money politik dan cara-cara *undemocratic* lainnya.

Penggunaan cara-cara yang tidak demokratis dan kekerasan tidak hanya terjadi pada elite politik tapi juga pada akar rumput. Perbedaan pandangan sering kali tidak diselesaikan dalam bentuk dialog tapi diselesaikan dengan cara-cara yang anarkis. Gejala ini tentu menjadi pertanyaan apakah pendidikan demokrasi yang selama ini didengungkan belum berhasil membuat bangsa Indonesia lebih demokratis, toleran dan menghargai keragaman, padahal di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pada pasal 3 disebutkan

bahwa : "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Pendidikan demokrasi tidak hanya dilakukan melalui mata pelajaran yang langsung membahas pokok bahasan tentang demokrasi, akan tetapi yang lebih penting adalah membiasakan anak didik untuk bersifat demokratis. Dalam kegiatan pembelajaran seharusnya menerapkan nilai demokrasi karena dalam UUSPN Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan yang disebutkan pada pasal 4 ayat 1 adalah : "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa".

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan harus diselenggarakan

menerapkan nilai-nilai demokrasi. Penanaman nilai-nilai demokrasi seyogyanya harus dilakukan pada semua mata pelajaran yang memungkinkan untuk menerapkan strategi pembelajaran yang didalamnya terkandung nilai-nilai yang demokrasi. Salah satunya dapat dilakukan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, terutama pada mata pelajaran fikih, karena di dalam Pendidikan Agama Islam banyak sekali materi-materi yang perlu didekati dengan pendekatan dan strategi pembelajaran yang demokratis.

Demokrasi pendidikan Islam secara epistemologis harus dilakukan dengan basis kebenaran relatif (kebalikan dari mutlak) dan paradigma pemikiran yang ilmiah. Basis kebenaran relatif dan paradigma pemikiran yang ilmiah ini, artinya benar untuk masa tertentu atau tempat tertentu namun belum tentu ditempat dan waktu yang lain.¹

Menurut Syarifuddin, materi pembelajaran fikih disampaikan hanya menurut salah satu pendapat yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para gurunya, padahal siswa memiliki latar belakang pengetahuan dan pengamalan yang berbeda.² Diantara perbedaan tersebut adalah berbedanya latar belakang pendidikan, pengetahuan, lingkungan tempat bergaul anak, sosial ekonomi, serta sosial kultural dan lain sebagainya.

Perbedaan latar belakang anak tersebut mengharuskan guru untuk memahaminya dan melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodir pandangan yang berbeda. Pada mata pelajaran fikih banyak sekali materi yang harus di terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sementara penerapan antara satu dengan yang lainnya sering terjadi perbedaan dalam hal-hal yang bersifat teknis.

¹ Syamsul Arifin dan Ahmad barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf Dalam Islam*, Malang : UMM Press, 2001. Hal. 133

² Syarifuddin, A. *Interilasi Fikih dengan Ilmu lain dalam Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1986. hal. 6

Menurut Philips, rumusan-rumusan fikih untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam disatu sisi dengan tuntutan kondisional masyarakat muslim disisi lain. Itulah sebabnya dalam konteks seperti itu, fikih bisa disebut pula sebagai produk upaya “pribumisasi” Islam yang diperoleh melalui proses interpretasi atas ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur’an maupun sunah Nabi. Hal ini diperlukan terutama untuk memelihara kesahihan beribadah sesuai dengan keyakinan dan keterbatasan pengetahuan.³

Dengan mengetahui perbedaan tersebut dapat menjadikan siswa lebih siap dalam memahami dan menghadapi perbedaan, sehingga hal-hal negatif seperti konflik atau permusuhan dapat dihindari, sekaligus menjadikan siswa lebih dewasa serta memiliki sikap toleran dalam menghadapi perbedaan. Penamaan sikap seperti ini diharapkan punya dampak tidak hanya pada pembelajaran ini, tapi juga dalam sikap kesehariannya.⁴

Pembelajaran yang demokratis tentunya menghindari cara-cara yang indoktrinasi serta serba hapalan, melalui model pembelajaran demokratis di kelas, diharapkan akan memberikan pengalaman berdemokrasi yang berharga baik bagi peserta didik dan pendidik. Dengan mengalami demokrasi secara langsung melalui pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual diharapkan persemaian kultur demokrasi (*democratic culture*) menjadi langkah awal yang strategis bagi pengembangan warga Negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan berkeadaban (*smart, active, critical, and*

³ Abu Ameenah Bilal Philips, *Evaluasi Fikih*, terj. Ginus Partadiredja Bandung: Anjana Pustaka, 2007. Hal. xi.

⁴Pengungkapan tentang keragaman pelaksanaan tradisi peribadatan ini lebih lengkap dikemukakan dalam buku Kutubuddin Aibak, *Fiqih Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, Yogyakarta: Teras, 2012. Hal. 60. Di dalam buku tersebut tidak menjustifikasi terhadap tradisi masyarakat melaksanakan peribadatan, tapi memaparkan apa adanya yang terjadi di masyarakat.

civilitized citizen).⁵ Model pembelajaran ini menerapkan nilai-nilai demokrasi serta dilakukan secara interaktif dan humanis dalam lingkungan yang demokratis.

Oleh karena itu, maka penerapan nilai-nilai demokrasi sangat penting untuk dilakukan pada pembelajaran fikih, karena tidak hanya meningkatkan hasil belajar fikih tapi juga dapat menanamkan sikap demokrasi bagi anak didik. Penanaman nilai-nilai demokrasi tidak didapatkan dengan serta merta tapi melalui proses yang panjang, karena menurut Robert W. Heffner untuk menuju tatanan demokrasi keadaban yang lebih *genuine* dan autentik bukanlah hal yang mudah dan instan; sebaliknya membutuhkan proses pengenalan, pembelajaran, dan pengamalan (*learning by doing*), serta pendalaman (*deepening*) demokrasi.⁶

Pada mata pelajaran fikih kegiatan pembelajaran harus diciptakan suasana yang demokratis atau dengan kata lain menerapkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk mendidik anak untuk bersikap demokratis, tapi juga karena materi pelajaran fikih banyak terdapat perbedaan sehingga memerlukan sikap saling memahami, menghargai dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, karena itu diperlukan guru yang dapat menerapkan nilai-nilai demokrasi. Namun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya⁷ selama ini kegiatan pembelajaran fikih masih banyak yang menggunakan cara-cara tradisional yaitu dengan pendekatan ekspositori. Menurut Mulyadi, metode mengajar guru selama ini lebih banyak menggunakan ceramah, yang hanya mentransfer pengetahuan (*transfer of knowlage*) kepada siswa. Hal ini

⁵ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2003. Hal. 5.

⁶ Ibid. Hal. 14

⁷ Mazrur, Model Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Palangka Raya, *Penelitian* (tidak dipublikasikan), Palangka Raya : STAIN Palangka Raya, Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, 2012, hal 83 – 86.

mengakibatkan situasi belajar membosankan, siswa pasif, dan kurang mendukung untuk pembentukan sikap demokratis. Strategi pembelajaran guru tersebut harus direformasi dengan strategi pembelajaran yang mengakibatkan siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.⁸ Dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi guru harus secara teratur menggunakan berbagai strategi pembelajaran interaktif seperti diskusi masalah-masalah aktual, sosial, dan membahas suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Inilah yang memunculkan pertanyaan seberapa banyak guru sudah menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih dan bagaimana cara guru menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan pembelajaran, apakah memiliki dampak terhadap perilaku anak didik, faktor apa yang mempengaruhi cara guru dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran dan berbagai pertanyaan lainnya yang layak untuk dikemukakan.

Beranjak dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih dapat dilakukan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, namun pada penelitian ini penerapan nilai di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Di samping memungkinkan mata pelajaran fikih ini sudah pernah mereka terima di jenjang pendidikan sebelumnya juga pada siswa MTs sudah memasuki usia yang dapat berdialog atau menurut Piaget sudah memasuki masa operasional formal.

Sehubungan dengan ini, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih di MTsN 1 Palangka Raya dan MTs Muslimat NU Palangka Raya; dan 2) Faktor apa yang mempengaruhi dalam penerapan nilai demokrasi pada mata

⁸ Mulyadi, Demokrasi dalam proses pembelajaran, mulyaihza.blogspot.com/2010/05/demokratisasi-dalam-proses-pembelajaran.htm, 1 Mei 2010. Dikutip tanggal 30 Maret 2017

pelajaran fikih di MTsN I dan MTs Muslimat NU Palangka Raya.

B. Deskripsi Teori

I. Konsep Demokrasi Pendidikan Islam

Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan berkehendak (*freedom of speak and press*). Artinya didalam tubuh demokrasi tercermin nilai keterbukaan sistem yang menyangkut gabungan kebutuhan naluriiah dan pilihan rasional masing-masing individu. Karena itu, di dalam demokrasi ruang lingkup pertukaran ide-ide menjadi semakin luas dan melibatkan semakin banyak unsur yang ada didalam masyarakat. Dengan perkataan lain. Pluralisme dan relativisme kebenaran pada akhirnya muncul untuk menggantikan absolutisme dan superioritas keserbatunggalan yang kini tampak lebih menjadi aus dan usang oleh petasan transformatif sosial budaya dan perubahan masyarakat modern.

Menurut KH. Abdurrahman Wahid, demokrasi dilihat dari segi sifatnya ada yang bersifat pokok dan ada yang sifatnya *derivasi* atau lanjutan dari yang pokok itu. Nilai pokok demokrasi, menurutnya adalah kebebasan, persamaan dan musyawarah atau permusyawaratan. Beliau juga mengutip pendapatnya Syekh Ali Abdurrazziq yang menyatakan bahwa inti demokrasi adalah kebebasan, keadilan dan syura.⁹ Demokrasi dapat dibedakan kepada formal-prosedural yang berupa syura. Artinya syura atau permusyawaratan sering dianggap demokrasi. Hal ini benar, kalau dilihat dari bentuk (form). Dengan kata lain, bentuk demokrasi dapat berubah syura dan lainnya. Dan demikian pula demokrasi dapat kita rujukan kepada material-substansial yang berupa nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, dan keadilan.

Demokrasi pendidikan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua orang, tanpa

membedakan ras (suku), kepercayaan, warna dan status sosial.

Secara etimologi, kata *syura* atau musyawarah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengeluarkan atau mengemukakan pendapat yang ada pandanya.¹⁰ Sedangkan menurut istilah (terminologis)-nya, para pemerhati kata itu berbeda-beda pendapat. Imam Al-Ashfahani mendefinisikan musyawarah adalah “mengeluarkan pendapat atau pemikiran untuk meneliti atau memeriksa (*muraja'ah*) dan membandingkan pendapat yang satu dengan yang lainnya.”¹¹ Dan menurut Ibn Araby, musyawarah adalah mengumpulkan berbagai alasan agar masing-masing individu menunjukkan (Arab: *Yastasiru*) dan mengemukakan pendapatnya.¹²

Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi membuat suatu kesimpulan bahwa musyawarah (*syura*) adalah berfikir tentang sesuatu masalah tertentu dengan orang untuk memperoleh dan menetapkan kemaslahatan yang dimaksud (dikehendaki) secara syari'ah.¹³

Syura, sebagai bentuk (form) pelaksanaan demokrasi yang bermacam-macam itu membawa nilai lain, yaitu keterbukaan. Karena itu, dalam pemikiran pendidikan yang demokratis, keterbukaan adalah mutlak diperlukan : keterbukaan yang mengandung perbedaan-perbedaan pendapat (ikhtilaf). Sebab dalam musyawarah, demikian persepsinya Anwar Haryono, bahwa lawan pendapat adalah kawan berpikir.¹⁴ Disana

¹⁰ *Mu'jam al-fadh al-Qur'an al-Karim, juz II, I'dad Majma' al-Lughah al-Arabiyah*, Kairo-Mesir 1970 M. Hal. 40

¹¹ Abu Tsana' al-Alausy, *Ruh al-Ma'ani di tafsir al-Qur'an al-Karim wa al-Sab'u al-Ma'ani*, al-Minbariyah, Mesir 1345 H, juz XXV. Hal. 42

¹² Abu Bakar Ibn al-Araby, *Ahkam Al-Qur'an*, juz I, Dar-al-Ihya'al-Kutub al-Arabiyah, 1957 M. Hal. 297

¹³ Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Restrukturisasi dan aktualisasi tradisi ikhtilaf dalam Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hal. 118

¹⁴ Anwar Hariyono, *Lawan Pendapat adalah Kawan Berpikir*, Majalah Bulanan Media Dakwah,

⁹ Abdurrahman Wahid, *Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi*, dalam M. Masyhur Amin & Mohammad Najib... op. Cit. Hal. 89

tidak boleh ada monopoli kebenaran dan apalagi semboyan-semboyan : “siapa tidak setuju saya, adalah musuh saya”.

Oleh karena itu, maka keterbukaan dalam bentuk wahana *syura* yang bersifat dialogis kiranya menjanjikan keselarasan dan keseimbangan diantara kepentingan atau penemuan yang berbeda. Sehingga demokratisasi pendidikan, akan berarti relevansinya dengan kemampuan profesional manusia peserta didik. Artinya, pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa pendidikan (baca : peserta didik).

Dengan demikian, jelaslah bahwa *syura* yang mencerminkan diri sebagai sebuah wahana keterbukaan merupakan salah satu prinsip demokrasi pendidikan Islam. Bahkan dalam perspektif demokrasi pendidikan Islam ini, *syura* adalah sebagai *common denominator* (titik pertemuan) bagi berbagai kepentingan yang berbeda.

2. Paradigma Pendidikan Islam Yang Demokratis

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk membantu, melatih, dan mengarahkan anak melalui transmisi pengetahuan, pengalaman, intelektual, dan keberagamaan sesuai dengan fitrah manusia supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang dicita-citakan, yaitu kehidupan yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang utama. Dengan lebih singkat dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang mengandung unsur-unsur pengajaran, latihan, bimbingan, dan pimpinan dengan tumpuan khas kepada pemindahan berbagai ilmu, nilai agama, dan budaya serta kemahiran yang berguna untuk diaplikasikan oleh individu (mengajar) kepada individu yang memerlukan pendidikan itu (pembelajar).

Pendidikan demokratis merupakan paradigma pendidikan yang harus dikembangkan di era global ini. Pendidikan demokratis merupakan model pendidikan

yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi. Yaitu, pendidikan yang menghargai perbedaan pendapat (*the right to be different*), kebebasan untuk mengaktualisasikan diri, kebebasan intelektual, kesempatan untuk bersaing didalam perwujudan diri sendiri (*self realization*), pendidikan yang membangun moral, dan pendidikan yang semakin mendekati diri kepada sang pencipta. Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) telah memberikan dasar bagi pelaksanaan pendidikan yang demokratis.

Agar kultur sekolah yang demokratis ini dapat terwujud maka proses pendidikan yang masih didominasi dengan kegiatan ceramah (menyampaikan informasi), mendengarkan, bukan interpretasi dan pemaknaan, serta berpusat pada guru (*teacher centris*) harus diubah dengan pola pendidikan yang menempatkan siswa sebagai pribadi yang unik. Yaitu, dengan memberi peluang yang luas kepada siswa untuk berkreasi, membangun imajinasi, serta mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam kaitan ini, Freire menyarankan untuk mencapai demokratisasi pendidikan yang berwawasan adalah dengan menciptakan kebebasan interaksi antara pendidik dengan peserta didiknya dalam PBM di kelas.¹⁵ Sebab itu, PBM harus terbuka dan penuh dialog yang sehat dan bertanggung jawab antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam bentuk *egaliter* dan *equiti* (kesetaraan). Dengan adanya kesetaraan ini, kebebasan berinisiatif berbeda aspirasi dan pendapat, dan keadilan dalam pendidikan maka terakomodasi dengan baik. Bahkan, Wahid seperti yang dikutip Freire telah meyakinkan kita bahwa pendidikan memang merupakan wahana terpenting untuk mencapai kemerdekaan (kebebasan).¹⁶ Dengan

¹⁵ Freire, P. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, Jakarta: Gramedia, 1984. Hal. 24

¹⁶ Ibid, Hal. xv

kebebasan ini, menurut Russel, akan mewujudkan demokratisasi pendidikan.¹⁷

Demokratisasi dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai pembebasan pendidikan dan manusia dari struktur dan sistem perundangan yang menempatkan manusia sebagai komponen.¹⁸ Menurut Hujair Sanaky, demokratisasi pendidikan merupakan pendidikan hati nurani. Artinya, pendidikan yang lebih menghargai potensi manusia, lebih humanis, beradab, dan sesuai dengan cita-cita masyarakat madani.¹⁹

Melalui demokratisasi pendidikan, diharapkan akan terjadi proses kesetaraan antara pendidikan dan peserta didik didalam proses belajar mengajar. Sementara Moh. Shofan dalam *realistik education*, mengatakan demokrasi pendidikan bukan hanya prosedur, melainkan juga nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia. Dengan demikian, demokratisasi pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif tanpa harus mengorbankan martabat dirinya.²⁰ Sedangkan, Mastuhu menyatakan bahwa demokratisasi pendidikan adalah gagasan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi manusia menurut kondisi subjektif atau kemampuannya untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diraihny.²¹

¹⁷ Russel, B., *Pendidikan dan Tatanan Sosial*, terj. Abadi, A.S., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998. Hal. 63

¹⁸ Ainun Naqim dan Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multi Kultural : Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2008. Hal. 61

¹⁹ Hujair Sanaki, *Paradigma Pendidikan Islam : Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Safira Insania Press, 2003. Hal. 245

²⁰ Moh. Shofan, *ed.Realistik Education ; Menuju Masyarakat Utama*, Yogyakarta: Ircisod, 2007. Hal. 123

²¹ Mastuhu, "Demokrasi Pendidikan Islam Indonesia, *Makalah*, disampaikan dalam diskusi panel senat mahasiswa *Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel*, Malang, 26 Oktober 1996.

Dalam pendidikan yang demokratis, perlu dikembangkan komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dengan peserta didik sehingga akan terjadi interaksi yang sehat dan bertanggung jawab. Peserta didik boleh saja berpendapat, berperasaan, dan bertindak sesuai dengan langkahnya sendiri dan mungkin saja berbeda dengan pendidiknya asalkan ada argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkannya.²² Selain itu, dalam pendidikan ini kemerdekaan dan kebebasan setiap peserta didik untuk beraktualisasi dan berekspresi harus dijunjung tinggi.

Disamping itu, pendidikan yang demokratis juga harus dapat mengembangkan toleransi dan *sosial trust* dikalangan anak didik. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan kesempatan, bahkan mendorong setiap anak didik untuk belajar hidup bersama dan saling menghargai melalui kebiasaan hidup berdampingan, serta berinteraksi dengan individu-individu dan kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan dengan lainnya.

3. Prinsip-prinsip Demokrasi Pendidikan Islam

Syamsul Arifin dan Ahmad Barazi dalam buku *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi* mengemukakan bahwa prinsip demokrasi pendidikan Islam ada empat, yaitu : 1) Tauhid : Sebuah Paradigma Kebebasan; 2) Syura : sebuah wacana Keterbukaan (Al Baqarah ayatn30); 3) Konsep tentang Kewajiban dan Hak Manusia dalam Pengembangan Ilmu (surat Az Dzariyat ayat 56); 4) Prinsip Sikap Ilmiah.

Selain beberapa prinsip diatas, dalam demokrasi juga terdapat empat fungsi yang terkait dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain, fungsi-fungsi tersebut sebenarnya merupakan implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi, yaitu : demokrasi sebagai kebebasan (*freedom*), demokrasi sebagai

²² Hujair Sanaki, *Paradigma Pendidikan Islam*,...Hal. 245

penghormatan akan martabat orang lain (*as respect for dignity of person*), demokrasi sebagai persamaan (*equality*), dan demokrasi sebagai wahana untuk berbagi (*sharing*).

4. Karakteristik Pembelajaran dengan Menerapkan Nilai Demokrasi

Beberapa prinsip demokrasi pendidikan Islam yang tersebut di atas, sepintas dapat disimpulkan adanya beberapa ciri demokrasi dalam pendidikan Islam. Menurut Mujianto, suatu pendidikan Islam, dapat dikatakan demokratis bila bercirikan lima hal, yaitu: (a) Tingginya komitmen keilmuan. (b) Menempatkan guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa sebagai subyek kependidikan yang sering berintegrasi, saling mengisi dan saling melengkapi. (c) Menempatkan pendidikan dan peserta didik secara proporsional : satu pihak sebagai penyampai ilmu dan lain penimba ilmu. Keduanya menghindari kecongkakan intelektual dan superioritas bagi guru serta imperioritas bagi murid. (d) Konsisten dengan prinsip belajar tuntas (*life long education*). (e) Tidak hanya berhenti pada retorika dan teori, ada langkah-langkah kongrit estafet dan pengalaman ilmu.²³

5. Teori-teori belajar yang mendukung pembelajaran yang demokratis

Banyak teori belajar yang dikembangkan oleh ahli pembelajaran. Diantara teori belajar yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran dengan menerapkan nilai demokrasi antara lain :

a. Teori *Free Discovery Learning* dari Bruner

Bruner mengemukakan empat tema pendidikan, yaitu pentingnya arti struktur pengetahuan, kesiapan (*readiness*), nilai intuisi dalam proses

pendidikan dan motivasi atau keinginan untuk belajar.²⁴

Bruner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dengan teorinya yang disebut *Free Discovery Learning*, Bruner mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.

b. Teori *Meaningful Learning* dari Ausubel

Menurut Ausubel, belajar merupakan asimilasi bermakna. Siswa mengasimilasi materi pelajaran dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam peristiwa pembelajaran tersebut diperlukan faktor motivasi dan pengalaman emosional, sebab tanpa motivasi dan keinginan yang kuat dari pihak pebelajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang dimilikinya.²⁵

c. Teori Perkembangan dari Piaget

Piaget mempelajari berfikir pada anak. Ia membahas tentang aspek perkembangan intelektual pada anak. Menurut Piaget ada tiga aspek perkembangan intelektual anak, yaitu struktur, isi dan fungsi. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan

²⁴ Ratna Willis Dahar., *Teori-teori Belajar*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 98.

²⁵ lihat Ausubel, D.P., *The Psychology of Meaningful Verbal Learning*, (New York: Grune and Straton, 1968), hlm. 114-120.

²³ Tant Mujianto, *Demokrasi Pendidikan*, Majalah Suara Muhammadiyah No. 22 Th. Ke-78, 16-30 November 1993. Hal. 48

kognitif ini menjadi empat,²⁶ yaitu: Tahap *sensori motor* (umur 0-2 tahun). Tahap *pra operasional* (umur 2-7/8 tahun). Tahap *operasional konkret* (umur 7 atau 8-11 atau 12 tahun). Tahap *operasional formal* (umur 11/12-18 Tahun).

d. Teori belajar Vygotsky

Menurut Vygotsky, perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang sesuai dengan teori *sosiogenesis*, yaitu : dimensi kesadaran sosial bersifat primer, sedangkan dimensi individualnya bersifat sekunder. Artinya pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial di luar dirinya. Hal ini tidak berarti bahwa individu bersikap pasif dalam perkembangan kognitifnya, tetapi ditekankan pada pentingnya peran aktif seseorang dalam mengonstruksi pengetahuannya.

Konsep-konsep penting teori *sosiogenesis* tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan revolusi sosiokultural dalam teori belajar dan pembelajaran adalah teori hukum genetik tentang perkembangan (*genetic law of development*) dan zona perkembangan proksimal (*zone of proximal development*), dan mediasi.²⁷

6. Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Penerapan Nilai Demokrasi

Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi mengemukakan beberapa faktor pendukung dan penghambat terciptanya demokrasi pendidikan Islam.

a. Faktor Pendukung

Pertama, format politik. Pelaksanaan pendidikan nasional termasuk di dalamnya pendidikan

agama (Islam) erat kaitannya dengan pola atau sistem secara format politik yang dianut oleh suatu bangsa. Hal mana pengertian format politik pada dasarnya merupakan suatu yang instrumental²⁸ *Kedua*, persamaan dan kebersamaan. Memperlakukan masyarakat pendidikan pada posisi yang sama merupakan syarat mutlak terciptanya demokrasi pendidikan Islam. *Ketiga*, kedewasaan intelektual dan emosional.²⁹ Kedewasaan intelektual akan mendorongnya untuk tidak sempit pandangan dalam mensikapi ranah perseteruan pemikiran yang berkembang. Sedangkan kedewasaan dan atau kematangan aspek emosional seseorang akan membentuk jiwa pribadi yang utuh dan tidak mudah dikotori oleh serpihan serpihan nepotisme, fanatisme, anarkisme, absolutisme, dan sebagainya.

b. Faktor Penghambat

Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi mengutip apa yang dikemukakan oleh Dr. AM. Saefuddin dalam buah karyanya,³⁰ ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya laju perjalanan demokrasi pendidikan Islam. *Pertama*, penyebab struktural; *Kedua*, penyebab kultural; *Ketiga*, penyebab natural atau alamiah; *Keempat*, penyebab legal.³¹

C. Metode Penelitian

I. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif. Jika dilihat dari sisi strategi dan metode penelitian, maka penelitian yang akan

²⁶ Lihat Jean Piaget, *The Child's Conception of the World*, (Savage, Maryland: Littlefield Publishers, 1951), hlm. 78.

²⁷ Lihat Lev Semyonovich Vygotsky, L.S. *Mind in Society*, (Cambridge: Harvard University Press, 1978), hlm. 1-34.

²⁸ A.M Syaefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996. Hal. 41

²⁹ Nurcholis Madjid, *Islam Kerakyatan dan Ke-Indonesiaan*, Bandung : Mizan. 1993. Hal. 182

³⁰ AM. Syaefuddin, *Ijtihad Politik ...* Hal. 107-108

³¹ Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma pendidikan ...*hal. 141 - 142

dilakukan menggunakan studi deskriptif, yaitu mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menganalisis kegiatan pembelajaran fikih dengan menerapkan nilai demokrasi di Madrasah Tsanawiyah.

Sebagai penelitian deskriptif, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kegiatan pembelajaran fikih. Seberapa banyak nilai demokrasi diterapkan dalam kegiatan pembelajaran fikih dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terhadap penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya, Ibukota Kalimantan Tengah. Penelitian ini difokuskan pada MTsN Model 1 Palangka Raya dan satu buah MTs Muslimat NU Palangka Raya.

Siswa yang akan diteliti adalah kelas I, akan diambil masing-masing satu kelas untuk MTs Muslimat NU dan MTsN Model 1 Palangka Raya. Siswa kelas I sudah memasuki usia sekitar 12 atau 13 tahun. Pada usia ini menurut Piaget sudah masuk pada "tahap operasional formal", pada tahap ini anak sudah mampu berfikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola fikir "kemungkinan".

3. Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah peneliti. Instrumen lainnya yang non manusia juga digunakan, tetapi fungsinya untuk mencari data awal, sebagai triangulasi dan sebagai cara untuk mencari data pendukung dalam kegiatan penelitian. Adapun teknik utama yang digunakan adalah observasi, yaitu mengamati secara intensif kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dalam mata pelajaran Fiqih. Di dalam kelas mengamati cara mengajar guru, penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran Fiqih, keadaan siswa dan hal-hal lain yang terkait dengan pembelajaran di kelas. Untuk mengadakan pendaaman juga dilakukan wawancara dan digunakan data pendukung yang ada dalam dokumen.

4. Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif konseptual, yaitu memulai dari informasi-informasi empirik yang diperoleh di lapangan, kemudian dibangun konsep-konsep atau proposisi-proposisi ke arah pengembangan suatu teori substantive. Tipe dasar proposisi yang digunakan adalah generalisasi empirik.

D. Temuan dan Pembahasan

Pada saat penelitian dilakukan, materi pembelajarannya adalah shalat. Strategi pembelajaran yang digunakan pembelajaran kooperatif. Penggunaan pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan kepada guru untuk melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran itu nampaknya dapat membuat siswa tidak hanya mendengar, tapi juga aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru juga tetap memperhatikan pertanyaan atau pendapat siswa tadi sambil menyampaikan pada siswa lainnya bahwa tentang pendapat siswa tersebut. Dengan demikian apa yang dikemukakan siswa dapat lebih jelas dipahami oleh siswa lainnya.

Dalam kegiatan pembelajaran ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pandangan atau pendapat yang berbeda dari siswanya, namun nampaknya semua siswa memiliki pengalaman yang sama dalam melaksanakan shalat.

Sebenarnya pelajaran tentang shalat ini sudah dipelajari oleh siswa pada saat mereka berada di Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, bahkan bagi siswa tertentu juga sudah belajar dan melaksanakan shalat pada saat di Taman Kanak-kanak, di lingkungan keluarga atau ditempat lainnya. Lingkungan tempat belajar anak tentunya mempengaruhi terhadap pandangan, pendapat dan kebiasaan anak, namun ternyata tidak terdapat perbedaan yang mendasar, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengemukakan jika terdapat perbedaan.

Di MTs lainnya, ada yang menggunakan kartu warna-warni yang bertuliskan bagian dari rukun, syarat dan sunat shalat. Kemudian secara berkelompok sesuai

warna kartu yang dipegang, dilanjutkan dengan pembahasan pada kelompok untuk mengurutkan susunan kartu sesuai dengan isi tulisannya.

Pada saat praktek shalat, metode pembelajaran yang digunakan adalah demonstrasi. Dimulailah satu persatu siswa yang diberi giliran oleh guru untuk maju kedepan untuk melaksanakan gerakan shalat disertai bacaannya. Setelah satu orang selesai melaksanakan shalat, siswa lainnya ada yang mengangkat tangan untuk mengoreksi apa yang dilakukan temannya. Dia menyampaikan kekeliruan yang dilakukan oleh temannya dalam melaksanakan gerakan dan bacaan shalat. Kemudian terjadilah diskusi antar siswa yang sudah melaksanakan shalat dengan siswa lainnya.

Kegiatan pembelajaran yang demikian menunjukkan adanya kebebasan yang diberikan guru untuk mendiskusikan dan saling bertukar pendapat, bertukar pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Terkadang ada pandangan yang berbeda yang dikemukakan oleh siswa, tentunya disertai dengan alasan yang bermacam-macam. Misalnya pada saat membaca tahiyat, ada siswa yang telunjuknya tegak dari awal tahiyat, tapi ada yang punya pandangan bahwa pada saat tahiyat telunjuknya ditegakkan pada saat membaca syahadat. Pandangan seperti ini diberikan kesempatan oleh guru untuk mengemukakan masing-masing alasan, setelah itu dijelaskan oleh gurunya kenapa terjadi perbedaan pandangan tersebut. Hal ini tentu memperkaya wawasan pengetahuan siswa, disamping cara yang digunakan mengajarkan kepada siswa bahwa setiap orang dapat memiliki pandangan yang berbeda sekalipun dalam hal ibadah, terlebih lagi pada persoalan lainnya.

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh kedua madrasah tsanawiyah memberikan gambaran bahwa pada dasarnya kegiatan pembelajaran fikih materi shalat sudah memasukkan nilai-nilai demokrasi terutama pada aspek metode. Ini menunjukkan bahwa berbagai macam materi pembelajaran dapat memasukkan nilai

demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Handan bahwa nilai dapat disebarkan dengan cara dan topik yang berbeda³²

Berbagai indikator dari nilai demokrasi yang diterapkan dalam pembelajaran fikih tersebut dapat dilihat dari aktivitas pembelajarannya. Berbagai nilai yang termasuk indikator dari nilai demokrasi dapat dibutiri dari kegiatan pembelajaran tersebut yaitu :

- a. **Kebebasan**, kegiatan pembelajaran fikih yang telah dikemukakan di atas menunjukkan adanya kebebasan berpendapat yang diberikan oleh guru. Guru mata pelajaran fikih memberikan kebebasan kepada siswanya untuk mengemukakan pengetahuan, pandangan dan pengalaman masing-masing, tanpa adanya batasan. Kebebasan yang diberikan dalam suasana keterbukaan dengan tidak melihat salah atau benar yang dikemukakan oleh siswa, yang terpenting siswa dapat berpandangan dan melakukan aktivitas dalam kerangka pembelajaran secara bebas, termasuk juga diberikan kebebasan untuk menanyakan yang belum mereka fahami. Kebebasan, persamaan dan musyawarah atau permusyawaratan adalah nilai pokok dari demokrasi, karena itu sangat penting memberikan kebebasan kepada anak untuk bermusyawarah. Menurut Syekh Ali Abdurraziq yang dikutip oleh Abdurrahman Wahid bahwa inti demokrasi adalah kebebasan, keadilan dan syura.³³ Dengan demikian pemberian kebebasan yang diberikan oleh guru mata pelajaran fikih untuk bermusyawarah dan mengemukakan pendapat adalah satu

³² Handan, Value Education Through Distance Learning: Opinions of Students who already Completed Value Education, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE January 2015 ISSN 1302-6488 Volume: 16 Number: 1 Article 8 Anadolu University, Educational Faculty Eskisehir,

³³ Abdurrahman Wahid, Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi, dalam M. Masykur Amin dan Moh Najibhal. 89.

- bentuk penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran.
- b. **Kesetaraan, kesamaan hak dan kesempatan.** Semua siswa diperlakukan sama, bahkan antara guru dan siswa seolah tidak ada jarak. Guru bisa mengkritisi pandangan atau pendapat siswa, siswa juga bisa mengkritisi pendapat guru. Dengan demikian materi yang dipelajari bisa lebih terinci dan lebih jelas. Demikian juga pada saat pembagian kelompok diskusi dan kelompok praktek. Siswa tidak dibedakan dari kemampuan maupun jenis kelamin, semua dianggap sama dan memiliki hak yang sama. Pada saat diskusi dalam kelompok atau melaksanakan tugas kelompok, semua anggota kelompok mempunyai tugas masing-masing dan semua siswa berperan untuk menyelesaikan tugas dengan baik.
 - c. **Keterbukaan.** Guru mata pelajaran fikih menanamkan nilai keterbukaan bagi siswanya. Terbuka untuk menerima masukan, koreksi dan pandangan yang berbeda. Diantara sikap keterbukaan yang ditanamkan oleh guru pada kegiatan pembelajaran fikih adalah tidak merasa paling benar dengan pendapatnya, tapi bersedia menerima kritik dan saran perbaikan. Nilai keterbukaan ini adalah salah satu dari nilai demokrasi
 - d. **Kerjasama.** Dalam menyelesaikan tugas kelompok, para siswa melakukan kegiatan secara bersama, mereka secara bersama-sama menyelesaikan tugas, misalnya menyusun urutan tentang wajib shalat, syarat sah shalat, sunat shalat dan hal-hal yang membatalkan shalat. Masing-masing kelompok bekerjasama untuk menyelesaikan tugasnya. Kerjasama adalah salah satu dari nilai demokrasi. Aplikasi darikerjasama diantaranya dengan bermusyawarah. Dengan bersama dan bekerjasama menetapkan sesuatu berarti sudah menerapkan nilai demokrasi.
 - e. **Toleransi.** Dalam pembelajaran fikih tidak jarang ada pendapat yang berbeda

disebabkan kebiasaan yang dilakukan di lingkungan rumah tangga atau lingkungan tempat tinggalnya berbeda dalam melakukan tata cara ibadah. Kebanyakan perbedaan-perbedaan itu dalam masalah furuiyah atau hal-hal yang bukan prinsip. Para siswa ditanamkan untuk menghargai perbedaan itu dan tidak memaksakan kehendaknya selama ada dalil atau mujtahid yang membolehkannya. Jika mereka memiliki pandangan yang berbeda karena mengikuti satu mazhab tertentu, maka guru mengajarkan untuk toleran terhadap pandangan yang berbeda tersebut, karena masing-masing memiliki landasan yang kuat. Toleran adalah satu nilai demokrasi. Hasan Asari dari UIN Syarif Hidayatullah dalam sebuah atikel yang berjudul Nilai-nilai Demokrasi dalam Pendidikan Islam Klasik, menyebutkan bahwa toleransi adalah sebagai nilai demokrasi yang penting dalam pendidikan Islam.

- f. **Kepercayaan dan persaingan.** Ternyata kepercayaan juga termasuk nilai demokrasi, karena kepercayaan terhadap kelompoknya pada saat mengerjakan tugas akan menjadi persaingan dengan kelompok lainnya, sehingga menimbulkan sikap bersaing, tapi tidak harus menetapkan diri dalam kerangka harus menang. Kepercayaan terhadap pandangan, kepercayaan terhadap diri sendiri dan kepercayaan terhadap kelompok bukan berarti mengajarkan kepada siswa untuk sombong, tapi tetap dalam kerangka menghargai orang lain. Menurut Chamim dkk : kepercayaan dan persaingan adalah bagian dari nilai demokrasi³⁴.

Mata pelajaran fikih di madrasah tsanawiyah berisi materi pelajaran yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sehari-hari. Pada materi pelajaran tersebut sekalipun

³⁴ Chamim, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal 35)

sudah ada petunjuk dan aturan yang jelas, namun ternyata tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perbedaan. Berbagai perbedaan tersebut seringkali membuat siswa bingung atau mungkin membuat pertanyaan yang tidak terselesaikan jika guru kurang bijak dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini tentunya dapat diselesaikan jika disikapi dengan cara menerapkan nilai demokrasi dalam pembelajaran. Nilai demokrasi bisa digunakan dalam pembelajaran fikih di madrasah tsanawiyah dapat dilakukan dengan baik manakala didukung oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran adalah :

- a. Kesiapan siswa. Kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran yang lebih tinggi dari pelajaran sebelumnya adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerapan nilai demokrasi dalam kegiatan pembelajaran fikih. Materi yang diberikan di kelas VII MTs ini adalah materi pelajaran yang sudah banyak diketahui dan dipraktikkan oleh siswa, namun materi pelajaran ini perlu untuk diadakan pendalaman, karena pelajaran yang diberikan pada jenjang sebelumnya di Taman Kanak-kanak atau di SD/MI hanya dalam bentuk hafalan. Dengan kata lain, siswa sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman dasar. Dengan pengetahuan dasar tersebut maka memungkinkan siswa untuk menemukan konsep dengan menganalisis penjelasan guru sesuai dengan yang difikirkan dan dialaminya.

Untuk memahami pelajaran yang lebih tinggi diperlukan kesiapan. Bruner berpendapat bahwa kesiapan (*readiness*) adalah salah satu dari empat tema pendidikan, yaitu : struktur pengetahuan, kesiapan, menekankan nilai intuisi dan motivasi atau keinginan untuk belajar. Keempat tema tersebut nampaknya sudah ada pada siswa MTsN 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya, sehingga menjadi faktor yang dapat mendukung

terhadap pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fikih.

- b. Kemampuan guru memahami perkembangan kognitif siswa. Menurut Piaget perkembangan kognitif siswa MTs berada pada tahap operasional formal, karena dilihat dari sudut usia sudah berada usia 11 atau 12 tahun lebih. Ciri pokok perkembangan kognitif pada tahap operasional formal adalah anak sudah mampu berfikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola fikir “kemungkinan”. Model berfikir ilmiah sudah mulai dimiliki siswa, dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan dan mengembangkan hipotesis. Guru mata pelajaran fikih di kedua MTs ini nampaknya memahami dengan kondisi siswa. Faktor ini tentunya tidak terlepas dari pengalaman guru yang sudah cukup lama mengajar di MTs, sehingga dapat memahami perkembangan kognitif siswa, walaupun secara teoritik mereka belum banyak menguasai, namun pada prakteknya sudah dapat melakukan.
- c. Penciptaan suasana yang menyenangkan. Suasana pembelajaran akan mempengaruhi dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang demokratis. Suasana yang diciptakan oleh guru adalah suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga para siswa tidak merasa tertekan dalam belajar. Siswa diberi kebebasan untuk berekspresi selama dalam kerangka pendalaman materi pelajaran. Nilai demokrasi bisa berkembang dengan suasana belajar yang menyenangkan atau yang sering disebut dengan *Joyfull Learning*. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bukan berarti tidak bermakna, tapi semua yang dilakukan harus memiliki makna, misalnya berdebat atau eradu argumentasi harus terarah sehingga semua kegiatan dalam pembelajaran penuh dengan makna atau menurut istilah Ausubel disebut “*meaningfull learning*”.

- d. Kebebasan berinteraksi. Siswa tidak hanya belajar secara individual, tapi siswa juga belajar bersama. Hal ini sesuai dengan teori belajar *sosiogenesis* dari Vygotsky yang mengatakan bahwa dimensi kesadaran sosial berifat primer, sedangkan dimensi individual bersifat skunder, artinya pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial yang berada di luar dirinya. Dalam pembelajaran fikih di kedua MTs tersebut para siswa mengkaitkan materi yang sedang dipelajari dengan yang terjadi di masyarakat. Siswa diberikan kebebasan berinteraksi antar siswa juga dengan guru, sehingga siswa dapat mengonstruksi nilai-nilai baru dalam pembelajaran dengan mengolah pengetahuan individunya dengan yang dia peroleh di masyarakat. Masing-masing siswa memiliki pengalaman dan kemampuan yang berbeda, karena itu penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran harus memperhatikan juga keunikan masing-masing siswa.
- e. Model pembelajaran yang digunakan. Pemilihan model pembelajaran sangat mempengaruhi dalam penembangan nilai demokrasi dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih harus memungkinkan untuk memberikan suasana yang demokratis dengan memberikan suasana kebebasan, kebersamaan, toleransi, kesetaraan, kepercayaan dan persaingan yang sehat. Model pembelajaran yang dipilih guru mata pelajaran fikih di kedua MTs tersebut adalah *direct learning* dan *cooperative learning*. *Direct learning* dikembangkan dengan bervariasi dan dilakukan dengan sikap yang santun sehingga memungkinkan berkembangnya nilai demokrasi. Terlebih lagi dengan *cooperative learning* tentu dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih demokratis.

E. Penutup

Fikih adalah satu mata pelajaran yang memungkinkan banyak terjadi perbedaan, karena itu dalam pembelajaran Fikih perlu ada unsur keterbukaan, kebebasan mengemukakan pendapat, toleransi, saling memahami dan mempercayai serta diperlukan kerjasama dalam mempelajari berbagai perbedaan pandangan dan kebiasaan dalam kebiasaan sehari-hari. Penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran juga akan berpengaruh dalam pembinaan karakter anak didik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M Syaefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Abu Ameenah Bilal Philips, *Evaluasi Fikih*, terj. Ginus Partadiredja Bandung: Anjana Pustaka, 2007.
- Abu Bakar Ibn al - Araby, *Ahkam Al-Qur'an*, juz I, Dar - al - Ihya'al - Kutub al - Arabiyah, 1957 M.
- Abdurahman Wahid, *Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi*, dalam M. Masyhur Amin & Mohammad Najib (ed.) : *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, LKPSM NU-DIY, 1993.
- Abu Tsana' al-Alausy, *Ruh al-Ma'ani di tafsir al-Qur'an al-Karim wa al-Sab'u al-Ma'ani*, al-Minbariyah, Mesir 1345 H, juz XXV.
- Ainun Naqim dan Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multi Kultural : Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2008.
- Anwar Hariyono, *Lawan Pendapat adalah Kawan Berpikir*, Majalah Bulanan Media Dakwah, No 197, Rabi'ul Akhir 1411 H/November 1990 M.
- Ausubel, D.P., *The Psychology of Meaningful Verbal Learning*, New York: Grune and Straton, 1968.
- B, Russel., *Pendidikan dan Tatanan Sosial*, terj. Abadi, A.S., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998
- Chamim, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan

- Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Depdiknas, UU RI No 20 Tahun 2003
Fiere, P. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, Jakarta: Gramedia, 1984.
Handan, Value Education Through Distance Learning: Opinions of Students who already Completed Value Education, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE January 2015 ISSN 1302-6488 Volume: 16 Number: 1 Article 8 Anadolu University, Educational Faculty Eskisehir,
Hujair Sanaki, *Paradigma Pendidikan Islam : Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Safira Insania Press, 2003.
Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, Yogyakarta: Teras, 2012.
Jean Piaget, *The Child's Conception of the World*, Savage, Maryland: Littlefield Publishers, 1951.
Lev Semyonovich Vygotsky, L.S. *Mind in Society*, Cambridge: Harvard University Press, 1978.
Mastuhu, "Demokrasi Pendidikan Islam Indonesia, *Makalah*, disampaikan dalam diskusi panel senat mahasiswa *Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel*, Malang, 26 Oktober 1996.
Mazrur, Model Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Palangka Raya, *Penelitian* (tidak dipublikasikan), Palangka Raya : STAIN Palangka Raya, Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, 2012.
Moh. Shofan, ed. *Realistik Education ; Menuju Masyarakat Utama*, Yogyakarta: Ircisod, 2007.
Mu'jam al-fadh al-Qur'an al-Karim, juz II, l'dad Majma' al-Lughah al-Arabiyah, Kairo-Mesir 1970 M.
Ramdhani, M. T., Lastaria, L., & Ariyadi, A. (2019). Pembelajaran Ekonomi dalam Islam pada Materi Mudharabah di Pondok Pesantren. *Anterior Jurnal*, 19(1), 32-40.
Syarifuddin, A. *Interilasi Fikih dengan Ilmu lain dalam Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1986
Ramdhani, M. T. (2016). Model Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan Sistem Moving Class Dalam Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa SMP IT Sahabat Alam. *Anterior Jurnal*, 15(2), 212-221.
Ramdhani, M. T., & Istiqlaliyah, I. (2018). Manajemen Pembelajaran di MIS Hidayatul Insan Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 17(2), 125-129.
Ratna Willis Dahar., *Teori-teori Belajar*, Jakarta: Erlangga, 1999.
Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2003.
Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, Yogyakarta: SIPRESS, 1994.
Ramdhani, Muhammad Tri, Lastaria Lastaria, and Ariyadi Ariyadi. "Pembelajaran Ekonomi dalam Islam pada Materi Mudharabah di Pondok Pesantren." *Anterior Jurnal* 19.1 (2019): 32-40.
Ramdhani, Muhammad Tri, LASTARIA LASTARIA, and ARIYADI ARIYADI. "PEMBELAJARAN EKONOMI DALAM ISLAM PADA MATERI SYIRKAH DI PONDOK PESANTREN." *Proceeding Antasari International Conference*. Vol. 1. No. 1. 2020.
Syaikhu, Syaikhu, Ariyadi Ariyadi, and Norwili Norwili. "Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer." (2020).